

LAPORAN KINERJA 2024 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BANJARBARU 2025



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
INSPEKTORAT

Alamat : Jl.Trikora No.1 Gedung Serba Guna Lt. 2 Banjarbaru 70713
Website : <http://inspektorat.banjarbarukota.go.id> / E-mail: inspektorat@banjarbarukota.go.id

Banjarbaru, 27 Februari 2025

Kepada Yth :
**Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Banjarbaru**
di –

Banjarbaru

SURAT PENGANTAR

Nomor : 700.1/17/II-S.P/ItKo/2025

No.	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.	Penyampaian Laporan Hasil Reviu Nomor : 700.1.2.1/67/II-Lap/ItKo/2025 dan Pernyataan Telah Direviu atas Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru Tahun 2024	2 (dua) Lampiran	Demikian disampaikan dengan hormat

Inspektur Kota Banjarbaru,



Drs. RAHMAT TAUFIK, M.Si, CGCAE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197006151990031006



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU INSPEKTORAT

Alamat : Jl.Trikora No.1 Gedung Serba Guna Lt. 2 Banjarbaru 70713
Website : <http://inspektorat.banjarbarukota.go.id> / E-mail: inspektorat@banjarbarukota.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru untuk Tahun 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Banjarbaru, 27 Februari 2025

Inspektur Kota Banjarbaru,



Drs. RAHMAT TAUFIK, M.Si, CGCAE

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 197006151990031006

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan Ridho-Nya, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024 dapat tersusun sesuai dengan tingkat keberhasilan yang dicapai, dan memberikan gambaran tentang apa yang telah dikerjakan dalam wujud Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan secara keseluruhan dan diharapkan dapat memberikan gambaran sistematika kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru selama satu Tahun. .

Tujuan pembuatan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja ditahun berikutnya dan diharapkan juga dapat menjadi salah satu bahan evaluasi dan pengambilan keputusan guna kemajuan dan perkembangan kegiatan serta peningkatan kualitas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup di Kota Banjarbaru.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini, akhir kata semoga Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 ini bermanfaat bagi Pemerintah Kota Banjarbaru dan khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru serta pihak yang berkepentingan dalam mengevaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.

Banjarbaru, Januari 2025
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Banjarbaru,



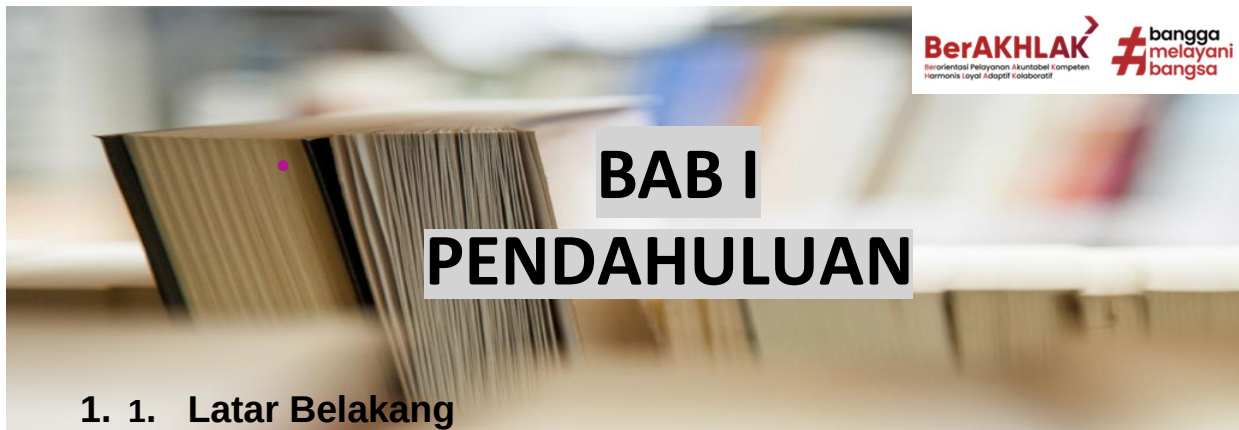
SIRAJONI, A.P., M.M.
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19750610 199501 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1. 1 Latar Belakang	1
1. 2 Dasar Hukum Pembentukan dan Gambaran Umum Organisasi.....	2
1. 3 Struktur Organisasi	8
1. 4 Aspek Strategis Organisasi Dan Isu Strategis Organisasi.....	10
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 14
2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama.....	14
2.2 Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023	17
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	 26
A. Capaian Organisasi	26
3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	27
3.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2 Tahun Terakhir ...	37
3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD/ Renstra dan Nasional	37
3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten/ Kota/Provinsi Tahun 2024	38
3.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan Solusi Alternatif yang akan dilakukan	38
3.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	42
3.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja	43
B. Realisasi Anggaran.....	44
 BAB IV PENUTUP	 47

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai (ASN) Dinas Lingkungan Hidup Menurut Jenis Kelamin, Eselon, Golongan, dan Pendidikan, 2024.....	8
Tabel 1.2	Tujuan, Sasaran dan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup	10
Tabel 2.1	Matrik Indikator Kinerja.....	14
Tabel 2.2	Penetapan Kinerja Tahun 2024 Sesudah Perubahan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru	15
Tabel 2.3	Program dan Kegiatan, Target Serta Pagu Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024.....	17
Tabel 3. 1	Capaian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup.....	26
Tabel 3. 2	Capaian kinerja sasaran terjaganya kelestarian lingkungan hidup dengan indikator Indeks Kualitas air memenuhi baku mutu	28
Tabel 3. 3	Capaian Kinerja Sasaran Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup Dengan Indikator Indeks Kualitas Udara Memenuhi Baku Mutu Tahun 2024	30
Tabel 3. 4	Capaian Kinerja Berdasarkan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2024 Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.....	32
Tabel 3. 5	Data Volume Sampah Yang Terkelola atau Pengurangan Sampah Selama Tahun 2024	32
Tabel 3. 6	Data Neraca Pengelolaan Sampah Tahun 2024 Kota Banjarbaru	33
Tabel 3. 7	Jumlah sampah yang tertangani tahun 2024.....	35
Tabel 3. 8	Capaian kinerja penanganan sampah	35
Tabel 3. 9	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Terhadap Realisasi dan Capaian Kinerja 2 (dua) tahun Terakhir.....	37
Tabel 3. 10	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD/Renstra dan Nasional.....	37
Tabel 3. 11	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Provinsi Tahun 2024.....	38
Tabel 3. 12	Realisasi Anggaran Kinerja Indeks Kualitas Air memenuhi baku mutu Tahun 2024	44
Tabel 3. 13	Realisasi Anggaran Kinerja persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga Tahun 2024	45
Tabel 3. 14	Realisasi Anggaran Kinerja persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga Tahun 2024	45
Tabel 3.15	Realisasi Anggaran Kinerja persentase Penanganan sampah Tahun 2024	46



1. 1. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban organisasi terhadap negara dan masyarakat serta salah satu upaya DLH Kota Banjarbaru mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Proses penyusunan Laporan Kinerja ini dilakukan setiap akhir tahun anggaran untuk mengukur capaian kinerja dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan di dalam dokumen penetapan kinerja.

Penyusunan LKJ berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan LKJ suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase.

Manfaat dari LKJ bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran. LKJ merupakan laporan yang berisi informasi capaian kinerja instansi pemerintah yang dapat digunakan sebagai komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup.

2. Mendorong Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Lingkungan Hidup di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1. 2. Dasar hukum Pembentukan dan Gambaran umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 76 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas Pokok dan fungsi Serta Tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru adalah membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan operasional bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan terhadap penyelenggaraan operasional urusan kesekretariatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru;
- c. perumusan dan penetapan kebijakan terhadap penyelenggaraan operasional bidang tata lingkungan di wilayah Kota Banjarbaru;
- d. perumusan dan penetapan kebijakan terhadap penyelenggaraan operasional bidang pengendalian lingkungan hidup dan ruang terbuka hijau di wilayah Kota Banjarbaru;
- e. perumusan dan penetapan kebijakan terhadap penyelenggaraan operasional bidang pengembangan kapasitas lingkungan di wilayah Kota Banjarbaru;
- f. perumusan dan penetapan kebijakan terhadap penyelenggaraan operasional bidang persampahan di wilayah Kota Banjarbaru; dan

- g. perumusan dan penetapan kebijakan terhadap penyelenggaraan operasional pada Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

KEPALA DINAS

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin Dinas Lingkungan Hidup dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan administrasi, teknis, dukungan yang bersifat substantif, dan pelaksanaan evaluasi serta pelaporan di bidang lingkungan hidup dan kesekretariatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan pembangunan sub sektor bidang lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan penetapan kebijakan administrasi dan teknis di bidang penyelenggaraan tata lingkungan, penegakan hukum dan pengendalian lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, pengembangan kapasitas lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juklak/juknis yang telah ditetapkan, dan/atau kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota Banjarbaru;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan tata lingkungan, penegakan hukum dan pengendalian lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, pengembangan kapasitas lingkungan;
 - c. pembinaan terhadap pengembangan sumber daya manusia (penelitian, bimbingan teknis, supervisi, dan inovasi) di bidang penyelenggaraan tata lingkungan, penegakan hukum dan pengendalian lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, pengembangan kapasitas lingkungan;
 - d. pengawasan atas pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan dan tata lingkungan, penegakan hukum dan pengendalian lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, pengembangan kapasitas lingkungan;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup kepada Wali Kota Banjarbaru melalui Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru; dan
- f. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota Banjarbaru.

SEKRETARIAT

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
 - b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

BIDANG TATA LINGKUNGAN

- (1) Bidang tata lingkungan dipimpin oleh seorang kepala bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
- (2) Bidang tata lingkungan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan administrasi dan teknis pada kegiatan Kajian Dampak lingkungan, Pengawasan Lingkungan, dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang tata lingkungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan standar, prosedur, dan kriteria pada bidang penyelenggaraan pengkajian dampak lingkungan, dan pemeliharaan lingkungan dan RTH;
 - b. pelaksanaan administrasi pada bidang penyelenggaraan pengkajian dampak lingkungan, dan pemeliharaan lingkungan dan RTH;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pada bidang penyelenggaraan pengkajian dampak lingkungan, dan pemeliharaan lingkungan dan RTH;

- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada bidang pengkajian dampak lingkungan, dan pemeliharaan lingkungan dan RTH;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru melalui Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru; dan
- f. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru

BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

- (1) Bidang pengelolaan sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dipimpin oleh seorang kepala bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
- (2) Bidang pengelolaan sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan administrasi dan teknis pada kegiatan penanganan sampah, pengurangan sampah dan pengelolaan TPA dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang pengelolaan sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan standar, prosedur, dan kriteria pada bidang penyelenggaraan kegiatan penanganan sampah, pengurangan sampah dan pengelolaan TPA dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - b. pelaksanaan administrasi pada bidang penyelenggaraan pengolahan kegiatan penanganan sampah, pengurangan sampah dan pengelolaan TPA sampah;
 - c. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pada bidang penyelenggaraan kegiatan penanganan sampah, pengurangan sampah dan pengelolaan TPA dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada bidang penyelenggaraan kegiatan penanganan sampah, pengurangan sampah dan pengelolaan TPA dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru melalui Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru; dan
- f. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru

BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN

- (1) Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan dipimpin oleh seorang kepala bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
- (2) Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan administrasi dan teknis pada kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan, standar, prosedur dan kriteria pada bidang penyelenggaraan kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan administrasi pada bidang penyelenggaraan kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pada bidang penyelenggara kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada bidang penyelenggara kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru melalui Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru, dan

- f. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru

BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

- (1) Bidang Penegakan Hukum dan Pengendalian Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang kepala bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
- (2) Bidang Penegakan Hukum dan Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan administrasi dan teknis pada kegiatan pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bidang penegakan hukum dan pengendalian lingkungan hidup menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan, standar, prosedur, dan kriteria pada bidang penyelenggaraan kegiatan pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;
 - b. pelaksanaan administrasi pada bidang penyelenggaraan kegiatan pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pada bidang penyelenggaraan kegiatan pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;
 - d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada bidang penyelenggaraan kegiatan pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penyelenggaraan kegiatan pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru melalui Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru; dan
 - f. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
- (2) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (3) Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi

1. 3. Struktur Organisasi

Secara umum Dinas Dinas Lingkungan Hidup memiliki sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2024 sebanyak 52 Orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 29 Orang dan Perempuan Sebanyak 23 Orang. Sedangkan Pegawai tidak tetap (PTT) berjumlah 2 Orang terdiri dari laki-laki sebanyak 1 Orang dan Perempuan sebanyak 1 Orang. dan 9 Orang Tenaga Kontrak (NRTK) terdiri dari 5 Orang Perempuan dan laki laki 4 Orang serta mempunyai 69 Orang Tenaga kontrak non Register pada Dinas Lingkungan Hidup serta pekerja kebersihan dan pekerja persampahan sebanyak 531 orang, penjaga taman kehati 5 orang

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai (ASN) Dinas Lingkungan Hidup Menurut Jenis Kelamin, Eselon, Golongan, dan Pendidikan, 2024

No.	Deskripsi	Rincian	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	29	55,76
		Perempuan	23	44,23
		jumlah	52	100.00
2	Eselon	Eselon IIB	1	1.92
		Eselon IIIA	1	1.92
		Eselon IIIB	4	7.69
		Eselon IVA	12	23,08
		Eselon IVB	1	1.92
		Jabatan fungsional	33	63,47

		Jumlah	52	100.00
3	Golongan	Golongan I	0	0.00
		Golongan II	8	14.29
		Golongan III	36	69.64
		Golongan IV	8	16.07
		Jumlah	52	100.00
4	Pendidikan	SMA	10	19.64
		D3	6	10.71
		D4	1	1.79
		S1	20	42.86
		S2	14	23.21
		S3	1	1.79
		Jumlah	52	100.00

Sumber; Sub Bagian Umpeg Sekretariat DLH

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Tata Lingkungan, terdiri dari:
 1. Seksi pengkajian Dampak Lingkungan
 2. Seksi Pemeliharaan Lingkungan dan ruang Terbuka hijau
- d. Bidang pengelolaan sampah dan limbah B3, terdiri dari;
 1. Seksi penanganan Sampah, Pengurangan sampah
 2. Seksi Pengelolaan TPA dan Limbah B3
- e. Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan , terdiri dari;
 1. Seksi Pengembangan Partisipasi Masyarakat
 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan
- f. Bidang Penegakan Hukum dan Pengendalian Lingkungan Hidup terdiri dari;
 1. Seksi Pemantauan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
 2. Seksi Pengawasan dan Penegakkan Hukum Lingkungan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:
 1. UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.

1. 4. Aspek Strategis Organisasi Dan Isu Strategis Organisasi

Keberhasilan pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru dalam mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis baik internal maupun eksternal.

Tabel 1. 2 Tujuan, sasaran dan strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kapasitas infrastruktur daerah dan lingkungan hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	meningkatnya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	memenuhinya angka indeks kualitas air dan indeks kualitas udara
			memenuhinya angka indeks kualitas air dan indeks kualitas udara
			memenuhinya angka indeks kualitas air dan indeks kualitas udara
		Meningkatnya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	meningkatnya informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat
			meningkatnya informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat
	Meningkatnya pengelolaan keaneka ragaman hayati dan ekosistem	meningkatnya pengelolaan keaneka ragaman hayati di kota Banjarbaru	meningkatnya pengelolaan keaneka ragaman hayati di kota Banjarbaru
			meningkatnya pengelolaan keaneka ragaman hayati di kota Banjarbaru
			meningkatnya pengelolaan keaneka ragaman hayati di kota Banjarbaru

	meningkatnya pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	meningkatnya pengelolaan penyimpanan sementara limbah B3	Meningkatnya jumlah pelaku usaha penghasil limbah B3 yang taat hukum
	meningkatnya pengetahuan pelaku usaha dan/atau masyarakat tentang pentingnya peran lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan	meningkatnya pelaku usaha yang taat terhadap peraturan perundangan	meningkatnya jumlah pelaku usaha makro dan mikro yang diawasi
	meningkatnya gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah	meningkatnya sekolah berwawasan lingkungan	meningkatnya jumlah sekolah yang mengikuti program adiwiyata
	meningkatnya Lingkungan kota yang bersih dan sehat	meningkatnya kota yang berwawasan lingkungan	meningkatnya pengelolaan lingkungan di perkantoran dan wilayah kota Banjarbaru
	menurunnya tingkat kerusakan lingkungan hidup akibat ketidak taatan pelaku usaha	menurunnya jumlah kasus pengaduan masyarakat dibidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup	meningkatnya penanganan kasus pengaduan masyarakat terkait pengelolaan lingkungan hidup (kasus) yang ditindak lanjuti
	meningkatnya pelayanan dan pengelolaan persampahan di kota Banjarbaru	meningkatnya pelayanan dan pengelolaan persampahan	Meningkatnya pengurangan dan penanganan sampah di kota Banjarbaru
			Meningkatnya pengurangan dan penanganan sampah di kota Banjarbaru
			Meningkatnya pengurangan dan penanganan sampah di kota Banjarbaru
			Meningkatnya pengurangan dan penanganan sampah di kota Banjarbaru
			Meningkatnya pengurangan dan penanganan sampah di kota Banjarbaru
			Meningkatnya pengurangan dan penanganan sampah di kota Banjarbaru

		meningkatnya pembinaan dan pengawasan pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta	Meningkatnya fasilitasi pemenuhan ketentuan terkait izin dan standar teknis pengelolaan sampah
			fasilitasi pemenuhan ketentuan terkait izin usaha dan standar teknis pengelolaan sampah

Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru diukur dari tercapainya indikator kinerja sasaran yang ditetapkan sesuai dengan visi dan misi. Pengukuran ini dilakukan untuk melihat tingkat kinerja dinas dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Apabila target dari indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis dapat dicapai, maka kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru dapat dikategorikan baik.

Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup

Selama periode 2021-2026, Dinas Lingkungan Hidup dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik di tingkat lokal, regional dan nasional, maupun internasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kota Banjarbaru pada tahun 2021-2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Secara umum, isu-isu yang menjadi landasan dalam perumusan strategi dalam penyusunan program dan kegiatan dalam periode 2021-2026 adalah **menurunnya kualitas lingkungan hidup** dan berikut ini adalah permasalahan yang ada antara lain

1. Belum maksimalnya Kuantitas dan Kualitas Air; ketersediaan air bersih dan degradasi kualitas air akibat pencemaran limbah masih menjadi tantangan untuk diatasi

2. Belum optimalnya Pengelolaan Persampahan; meningkatnya jumlah volume persampahan yang berdampak pada perlunya pengelolaan yang berkelanjutan
3. Semakin meingkatnya Lahan Kritis; meluasnya lahan kritis perlu diidentifikasi agar dapat ditetapkan faktor penyebab dan teknik penanggulangannya.
4. Masih terjadi Kebakaran Lahan, Faktor yang juga memperbesar resiko terjadinya karhutla diantaranya, sebaran titik panas, kemarau dan utamanya akibat ulah manusia
5. masih adanya Banjir; salah satu penyebabnya adalah semakin merosotnya daya dukung lingkungan
6. Masih kurangnya luasan RTH publik;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dan Indikator Kinerja Utama

K keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru Tahun 2024 sangat ditentukan oleh seluruh unit kerja SKPD, dengan keterbatasan sumberdaya yang ada perlu penetapan fokus dan prioritas yang tepat dalam Rencana Kinerja tahun 2025 yang dapat diukur melalui indikator kinerja mengacu kepada permendagri nomor 54 tahun 2010 dan standar Pelayanan Minimal (SPM). Indikator kinerja berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi Pimpinan dan aparatur Dinas Lingkungan hidup dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan di bidang lingkungan hidup

Matrik Indikator Kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tertuang dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Matrik Indikator Kinerja

No	Misi II	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi awal	Target capaian		Kondisi Akhir
							2023	2024	2026
1	Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur perkotaan	Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur perkotaan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	51,71	60.37	66,84	60.65

Indeks Lingkungan Hidup Kota yang terdiri atas tiga komponen indeks, yakni *Indeks Kualitas Udara (IKU)*, *Indeks Kualitas Air (IKA)*, *Indeks Tutupan*

Lahan. Setiap Kabupaten/Kota maupun Propinsi mempunyai satu nilai tunggal Indeks Kualitas udara, Indeks Kualitas Air, Indeks Tutupan Lahan.

Adapun penetapan kinerja tahun 2024 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Penetapan Kinerja Tahun 2024 sesudah perubahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks kualitas air memenuhi baku mutu	50,40
		Indeks kualitas udara memenuhi baku mutu	83,48
2.	Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Sampah	Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	26
		Persentase penanganan sampah	74

Program		Anggaran	
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	10.138.373.975,00
1.	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp.	1.000.174.750,00
2.	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Rp.	6.555.780.000,00
3.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp.	2.459.261.250,00
4.	Pengendalian bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Rp.	51.219.450,00
5.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp.	410.748.750,00
6.	Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan local dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Rp.	42.400.000,00
7.	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp.	3.634.119.800,00
8.	Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp.	317.500.000,00
9.	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp.	26.199.850,00
10.	Pengelolaan persampahan	Rp.	37.330.971.350,00

Berikut disampaikan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru Tahun 2024



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SIRAJONI, AP., M.M.

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H., M.H.

Jabatan : Wali Kota Banjarbaru

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, 22 Januari 2024

Pihak Kedua,

WALI KOTA BANJARBARU,

H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H., M.H.

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

SIRAJONI, AP., M.M.
NIP. 197506101995011001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO. (1)	SASARAN PROGRAM (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Terjaganya kelestarian lingkungan hidup	Indeks kualitas air memenuhi baku mutu Indeks kualitas udara memenuhi baku mutu	50.40 83.48
2.	Meningkatnya manajemen pengelolaan sampah	Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga Persentase penanganan sampah	26 74

Program

Anggaran

1.	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp.	825.186.000,-
2.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp.	7.054.856.300,-
3.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp.	1.484.270.000,-
4.	Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Rp.	51.219.450,-
5.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp.	403.248.750,-
6.	Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Rp.	42.400.000,-
7.	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp.	2.714.119.800,-
8.	Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp.	300.000.000,-
9.	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp.	26.199.850,-
10.	Pengelolaan Persampahan	Rp.	31.269.243.550,-
11.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	9.241.570.110,-

Banjarbaru, 22 Januari 2024

Pihak Kedua,

WALI KOTA BANJARBARU,

H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H., M.H.

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

SIRAJONI, AP., M.M.
NIP. 197506101995011001

2.2. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat: Program, Kegiatan dan sub Kegiatan; Lokasi Kegiatan; Indikator Kinerja; Kelompok sasaran; Pagu indikatif dan prakiraan maju tahun berikutnya.

Rencana kinerja tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru disusun dengan memaduserasikan antara RPJMD Kota Banjarbaru dengan rencana-rencana program Kementerian Lingkungan Hidup 2021-2026 dan Rencana program Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Beberapa rencana kinerja tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 3

Program dan Kegiatan, Target Serta Pagu Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

No	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (202)	
1	2	3	4	
			K	Rp
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Cakupan Pelayanan Internal yang diFasilitasi	A Nilai	9.241.570.110
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja SKPD dan Persentase Perencanaan Penganggaran yang responsif gender	100 Persen	445.360.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	25.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	420.360.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	100 Persen	6.658.975.740
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	6.612.880.740

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	46.095.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah yang tersusun dengan baik	100 Persen	36.499.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	16.500.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	19.999.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	B Nilai	488.595.500
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	10.057.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	297.414.500
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.214.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	126.810.000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	45.100.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah yang dapat digunakan	100 Persen	289.493.800
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	49.984.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	124.846.600
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	100.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	14.663.200

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah yang difasilitasi	100 Persen	625.778.520
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	299.655.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	326.123.520
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik	100 Persen	696.867.550
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	9.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	113 Unit	201.987.550
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	29.920.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	441.360.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	14.600.000
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase perencanaan Lingkungan Hidup yang tersusun dengan baik	100 persen	825.186.000
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase RPPLH yang tersusun dengan baik	100 persen	543.336.000
	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	543.336.000
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS Kota Banjarbaru	1 Dokumen	281.850.000
	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	281.850.000
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	-

	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara yang memenuhi baku mutu	IKA 58,67 IKU 88,91 Indeks	6.495.930.000
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan indeks kualitas air dan indeks kualitas udara yang memenuhi baku mutu	100 persen	6.285.999.750
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	200 Dokumen	6.220.999.750
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	65.000.000
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Mutu yang dilaksanakan	100 persen	24.999.550
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	16 Laporan	24.999.550
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase tindakan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100 persen	184.930.700
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	16 Dokumen	25.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	1 Dokumen	29.930.700
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	1 Dokumen	130.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan, kebun raya, RTH, dan taman keanekaragaman hayati lainnya dalam kondisi yang terpelihara baik	100 Persen	1.484.270.000
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	persentase pengelolaan taman KEHATI	100 Persen	1.484.270.000

	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	99.999.750
	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Ha	193.000.000
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Ha	1.087.678.250
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	1 Unit	103.592.000
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Peningkatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100 Persentase	51.219.450
	Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase Pelaku Usaha yang Taat Terhadap Pengolahan Limbah B3 dan Air Limbah	96 Persen	51.219.450
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	135 Dokumen	36.220.100
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	90 Laporan	14.999.350
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Oleh Pemerintah Kota	96 Persentase	403.248.750
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan/Usaha yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	403.248.750
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	45 Dokumen	99.999.900
	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	5 Orang	24.999.150

	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	550 Laporan	278.249.700
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase pelaksanaan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait PPLH	100 persen	42.400.000
	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase pelaksanaan pengakuan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	100 persen	42.400.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1 Dokumen	42.400.000
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pelaksanaan program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	100 persen	2.714.119.800
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dengan baik	100 persen	2.714.119.800
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	0 Orang	75.000.000
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	89.000.000
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	148 Lembaga	2.550.119.800
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat yang dilaksanakan	100 persen	300.000.000

	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota	100 Penghargaan	300.000.000
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	9 Entitas	300.000.000
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diselesaikan	100 persen	26.199.850
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan masyarakat dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diverifikasi	100 persen	26.199.850
	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	10 Dokumen	26.199.850
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan persampahan	100 persen	31.269.243.550
	Pengelolaan Sampah	Persentase volume sampah yang ditangani oleh pemerintah kota	100 persen	30.946.843.550
	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	12 Laporan	1.394.119.700
	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	38264.02 Ton	3.282.791.250
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	130 Kelompok	44.869.900

	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen	792.000.000
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Sesuai kebutuhan Unit	25.433.062.700
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah Pihak Swasta pengelola sampah	20 pengelola sampah	322.400.000
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	20 Laporan	282.400.000
	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	2 Laporan	40.000.000
	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP			735.508.800
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Cakupan Pelayanan Internal yang difasilitasi	A Nilai	176.582.500
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	B Nilai	53.782.500
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.396.500
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.415.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.400.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.776.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	26.795.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah yang difasilitasi	100 Persen	110.900.000

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	98.900.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah dalam kondisi baik	100 Persen	11.900.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	11.900.000
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara yang memenuhi baku mutu	IKA 58,67 IKU 88,91 Indeks	558.926.300
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan indeks kualitas air dan indeks kualitas udara yang memenuhi baku mutu	100 persen	558.926.300
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1 Dokumen	558.926.300
JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM				53.588.896.310

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3. Capaian Kinerja Organisasi

Berikut disajikan Capaian kinerja terhadap Perjanjian Kinerja awal berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terjaganya kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks kualitas air memenuhi baku mutu	50,40	56.36	111.82%
		Indeks kualitas udara memenuhi baku mutu	83,48	96.46	115.55%
2.	Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Sampah	Persentase pengurangan sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis rumah tangga	26	27.94	107.46%
		Persentase penanganan sampah (Rumus negative)	74	72.02	102.68%

Rumus untuk menghitung capaian kinerja setiap indikator ada dua macam :

- Indikator bermakna positif, artinya : jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus pendek yaitu (Realisasi : Target) x 100%
- Indikator bermakna negatif, artinya : jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, gunakan rumus panjang. Yaitu : $\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$

Target

3.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

3.1.1. TERJAGANYA KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

a. INDEKS KUALITAS AIR MEMENUHI BAKU MUTU

Perhitungan indeks kualitas air (IKA) dilakukan sebagai berikut

TATA CARA PERHITUNGAN INDEKS KUALITAS AIR

Komponen Indeks	Parameter	Rumus
Indeks Kualitas Air (IKA)	pH; BOD; COD; TSS; DO; NO ₃ -N; Total Phosphat; Fecal Coliform.	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_A}{2}}$ <i>IP_j</i> = Indeks pencemaran bagi peruntukkan <i>j</i> <i>C_i</i> = konsentrasi parameter <i>i</i> (hasil pengukuran) <i>L_{ij}</i> = Baku mutu parameter <i>i</i> bagi peruntukkan <i>j</i> <i>M</i> = maksimum, <i>A</i> = average (rata-rata)

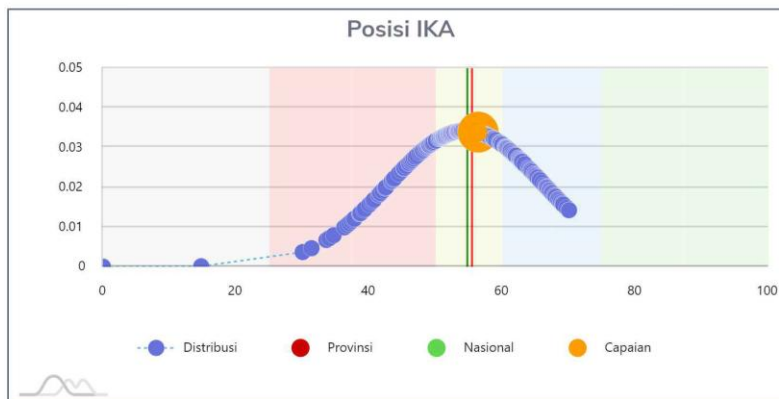
Capaian Kinerja Tahun 2024

IKA
56.36
SEDANG

Indeks Respon IKA
0.00

Peringkat

Nasional : 114 dari 514 Kabupaten/Kota
Provinsi : 6 dari 13 Kabupaten/Kota



Data Pemantauan			
	Titik Pantau	Data Masuk	Data Terverifikasi
PUSAT	0	0	0
P3E	0	0	0
PROVINSI	2	4	4
KAB/KOTA	9	18	18
TOTAL	11	22	22



Sumber: Raport IKLH kementerian KLHK

Dari data indeks kualitas air diatas, Kota Banjarbaru dapat di kategorikan **sedang** dengan target IKA tahun 2024 adalah 50.40 indeks dan realisasi tahun 2024 adalah 56.36 indeks dengan capaian 111.82%

Range Tabel kualitas Air:

Skor	kriteria
>= 90	Sangat baik
70- < 90	baik
50 - < 70	sedang
25 - < 50	buruk
< 25	Sangat Buruk

Tabel 3. 2 Capaian kinerja sasaran terjaganya kelestarian lingkungan hidup dengan indikator Indeks Kualitas air memenuhi baku mutu adalah :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks kualitas air memenuhi baku mutu	indeks	50.40	56.36	111.82%

Berikut ini dokumentasi pengambilan sampei uji kualitas air



b. INDEKS KUALITAS UDARA (IKU) MEMENUHI BAKU MUTU

Indeks kualitas udara (IKU) model EV dikonversikan menjadi indeks kualitas udara melalui persamaan:

TATA CARA PERHITUNGAN INDEKS KUALITAS UDARA

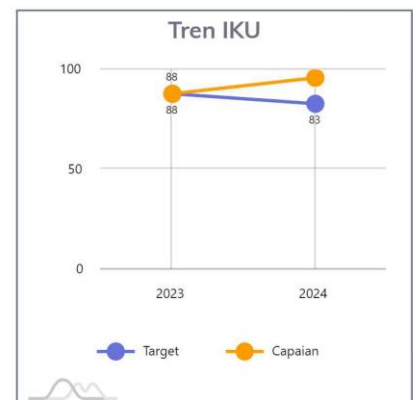
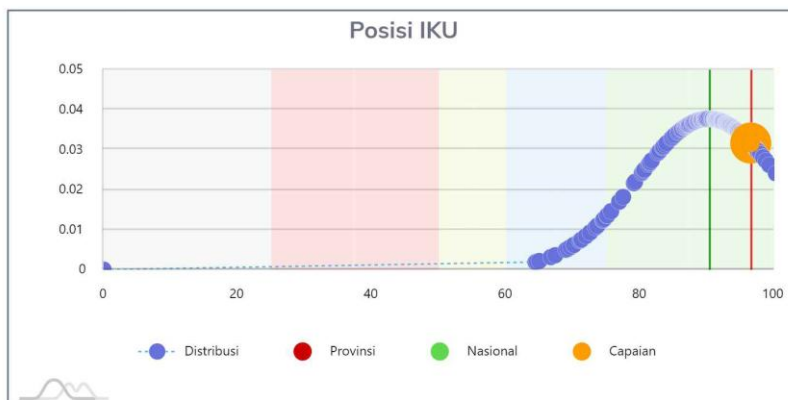
Komponen Indeks	Parameter	Rumus
Indeks Kualitas Udara (IKU)	NO ₂ dan SO ₂	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{eu} - 0,1) \right)$ $I_{eu} = 50\% \text{ Indeks SO}_2 + 50\% \text{ Indeks NO}_2$

Capaian Kinerja Tahun 2024

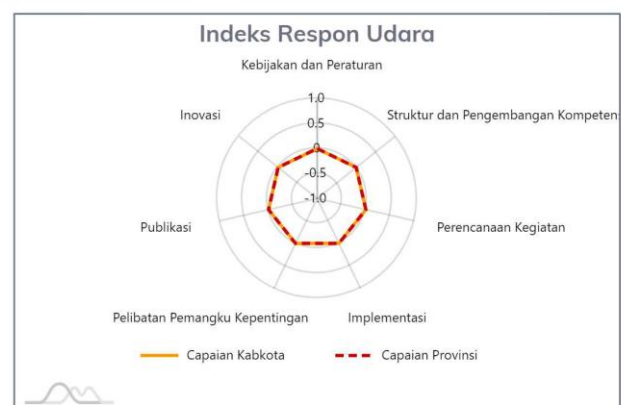
IKU
96.46
SANGAT BAIK

Indeks Respon IKU
0.00

Peringkat
Nasional : 25 dari 514 Kabupaten/Kota
Provinsi : 8 dari 13 Kabupaten/Kota



Data Pemantauan			
	Titik Pantau	Data Masuk	Data Terverifikasi
PUSAT	4	7	7
P3E	0	0	0
PROVINSI	4	8	8
KAB/KOTA	0	0	0
TOTAL	8	15	15



Indeks kualitas udara model EV dikonversikan menjadi indeks kualitas udara melalui persamaan:

Indeks Udara = $100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{ev} - 0,1) \right)$ target untuk tahun 2024 adalah 83.48

Dari data hasil analisis Laboratorium Udara Ambien dengan Metode Passive Sampler Tahun 2024 di hitung menggunakan website IKLH Indeks Kualitas Udara (IKU) memenuhi baku mutu untuk Wilayah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Udara} = 100 - \frac{(50 \times (\text{LEV} - 0,1))}{0,9} = 96.46$$

Tabel 3. 3 Capaian Kinerja Sasaran Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup Dengan Indikator Indeks Kualitas Udara Memenuhi Baku Mutu Tahun 2024 adalah :

	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks kualitas udara memenuhi baku mutu	indeks	83.48	96.46	115.55%

Sumber : hasil perhitungan dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Range Pengukuran Indeks kualitas Udara

Skor	kriteria
≥ 90	Sangat baik
$70 - < 90$	baik
$50 - < 70$	sedang
$25 - < 50$	buruk
< 25	Sangat Buruk

Dari data indeks kualitas Udara diatas, Kota Banjarbaru dapat di kategorikan IKU **sangat baik** dengan target IKU tahun 2024 adalah 83.48 realisasi 96.46.

Berikut ini dokumentasi pengambilan sample kualitas Udara



3.1.2. MENINGKATNYA MANAJEMEN PENGELOLAAN SAMPAH

a. PERSENTASE PENGURANGAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS RUMAH TANGGA

Menurut UU No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, dalam pengurangan sampah yang terdiri dari pembatasan terjadinya sampah (R1), guna ulang (R2), dan daur ulang (R3).

- Pembatasan terjadinya sampah (Reduce) timbulan sampah Upaya mengurangi terbentuknya limbah, termasuk penghematan dan pemilihan bahan yang dapat mengurangi kuantitas limbah serta sifat bahaya dari limbah.
- Guna ulang (Reuse) Upaya yang dilakukan bila limbah tersebut dimanfaatkan kembali tanpa mengalami proses atau tanpa transformasi baru, misalnya botol minuman kembali menjadi botol minuman.
- Daur ulang sampah (Recycle) Residu atau limbah yang tersisa atau tidak dapat dimanfaatkan secara langsung, kemudian diproses atau diolah untuk dapat dimanfaatkan, baik sebagai bahan baku maupun sebagai sumber energi. Misalnya botol minuman dilebur namun tetap dijadikan produk yang berbasis pada gelas. Bisa saja terjadi bahwa kualitas produk yang baru sudah mengalami penurunan dibanding produk asalnya.

Menurut hasil penelitian secara sederhana yang dilakukan oleh pejabat, staf dan pengawas sampah Bidang Persampahan, untuk volume sampah yang dihasilkan oleh penduduk kota Banjarbaru rata-rata perorangnya adalah 0,6857 Kg sampah per hari hal ini didapat dari sampah penduduk asli, sampah singgah, sampah pekerja, sampah perusahaan dan sampah spesifik (bongkaran bangunan/tebangan) serta kota Banjarbaru menjadi Ibu Kota provinsi.

Jumlah penduduk tahun 2024 (data jumlah penduduk menurut wikiepedia) x volume sampah yang dihasilkan oleh setiap orang (0.686Kg) x jumlah hari dalam satu tahun (365hari) = 78.318 Orang x 0.68602 kg x 365 hari = 69.690,95 ton pertahun atau 190,93 Ton per hari,

Metode pengukuran indikator kinerja tersebut yaitu volume sampah yang ditangani dibagi volume timbulan sampah di kali 100 %.

Adapun capaian kinerja berdasarkan target, realisasi dan capaian Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Capaian Kinerja Berdasarkan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2024
Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

No	Indikator Kinerja utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Pengurangan sampah Rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	%	26	27.94	107.46

Volume timbunan sampah di Kota Banjarbaru pada tahun 2024 dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah penduduk tahun 2024 (data jumlah penduduk menurut wikipedia) x volume sampah yang dihasilkan oleh setiap orang (0.686Kg) x jumlah hari dalam satu tahun (365hari)

278.318 Orang x 0.68602 kg x 365 hari = 69.690,95 ton pertahun atau 190,93 Ton per hari,

Untuk indikator kinerja persentase pengurangan sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis rumah tangga target pada tahun 2024 adalah 26% dari jumlah timbunan sampah yang ada di Kota Banjarbaru.

Berikut ini data Volume sampah yang terkelola atau pengurangan sampah selama tahun 2024

Tabel 3. 5 Data Volume Sampah Yang Terkelola atau Pengurangan Sampah Selama Tahun 2024

KETERANGAN		NILAI (ton/tahun)
	Jumlah Pengurangan Sampah	19.471,56
a	Jumlah Pembatasan Timbunan Sampah	3.421,55
b	Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	0
c	Jumlah Pendaauran Ulang Sampah	16.049,97

Sumber: Neraca pengelolaan sampah thn 2024 sistem SIPSN

Metode pengukuran indikator kinerja tersebut yaitu volume sampah yang dikurangi dibagi volume timbunan sampah di kali 100 %.

$$\left(\frac{\text{Total Volume Sampah yang dikurangi (Ton)}}{\text{Total Volume Timbunan Sampah (Ton)}} \times 100 \right)$$

$$= \left(\frac{19.471,56 \text{ Ton}}{69.690,95 \text{ (Ton)}} \times 100 \right)$$

$$= 27,94\%$$

Tabel 3. 6 Data Neraca Pengelolaan Sampah Tahun 2024 Kota Banjarbaru

KETERANGAN	NILAI (Ton/tahun)
I . JUMLAH TIMBULAN SAMPAH	69.690,95
(Jumlah Penduduk x Faktor Estimasi Timbulan Perkapita)	
II. JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH	19.471,56
Persentase pengurangan sampah	27,94%
Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah	3.421,55
Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	0
Jumlah Pendaauran Ulang Sampah	16.049,97
III. JUMLAH PENANGANAN SAMPAH	50.193,70
Persentase penanganan sampah	72,02
Pengolahan	144,68
Pemrosesan akhir	50.049,02
IV. SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)	69.665,22
Persentase sampah terkelola	99.66
SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)	25,73
Persentase sampah tidak terkelola	0.04

Sumber : diambil dari SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional)2024

Berikut ini dokumentasi kegiatan pengurangan sampah di TPS3R



Dokumentasi kegiatan pengurangan sampah di PDU



b. PERSENTASE PENANGANAN SAMPAH

Untuk indikator kinerja persentase Penanganan sampah **target** pada tahun 2024 adalah 74% dari jumlah timbulan sampah yang ada di Kota Banjarbaru.

Metode pengukuran indikator kinerja tersebut yaitu volume sampah yang ditangani dibagi volume timbulan sampah di kali 100 %.

$$= \left(\frac{\text{Total Volume Sampah yang ditangani (Ton)}}{\text{Total Volume Timbulan Sampah (Ton)}} \times 100 \right)$$

$$= \left(\frac{50.193,70 \text{ Ton}}{69.690,95 \text{ (Ton)}} \times 100 \right)$$

$$= 72,02\%$$

Untuk menghitung indikator persentase penanganan sampah ini menggunakan Indikator bermakna negatif, artinya : jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, gunakan rumus panjang

Yaitu : $\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$

Target

Sehingga dapat dihitung sebagai berikut

$$\frac{74 - (72,02 - 74)}{74} \times 100 = \frac{74 - (-1,98)}{74} \times 100\% = 102,67\%$$

Tabel 3. 7 jumlah sampah yang tertangani tahun 2024

KETERANGAN	NILAI (Ton/tahun)
III. JUMLAH PENANGANAN SAMPAH	50.193,70
Persentase penanganan sampah	72,02
Pengolahan	144,68
Pemrosesan akhir	50.049,02
Jumlah Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	50.193,70

Sumber : Neraca Pengelolaan Sampah tahun 2024 P1

Tabel 3. 8 Capaian kinerja penanganan sampah

No	Indikator Kinerja utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase penanganan Sampah (Rumus bermakna Negatif)	%	74	72,02	102,67

Berikut ini dokumentasi Penanganan sampah di TPA



3.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Terhadap Realisasi dan Capaian Kinerja 2 (dua) tahun Terakhir

Tabel 3. 9 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Terhadap Realisasi dan Capaian Kinerja 2 (dua) tahun Terakhir

No.	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Indeks kualitas air memenuhi baku mutu	55,26	92,82%	49.09	97.59%	56.36	111.82%
	Indeks kualitas udara memenuhi baku mutu	87,64	99,69%	88.91	106.63%	96.46	115.55%
2.	Persentase pengurangan sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis rumah tangga	24,05	100.21%	26.02	104.08 %	27.94	107.46%
	Persentase penanganan sampah (Rumus negative)	75.88	100.16%	73.97	101.37 %	72.02	102.68%

Sumber data diolah subbag perencanaan DLH

3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD/Renstra dan Nasional

Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD/Renstra dan Nasional

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2024	Target Renstra	Target Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terjaganya kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks kualitas air memenuhi baku mutu	56.36	50.40	55,5
		Indeks kualitas udara memenuhi baku mutu	96.46	83.48	84.5
2.	Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Sampah	Persentase pengurangan sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis rumah tangga	27.94	27	28
		Persentase penanganan sampah (Rumus negative)	72.02	73	72

Sumber Renstra DLH bjbru dan renstra Ditjen PPKL tahun 2020-2024

terdapat perubahan target indikator sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2024 dan telah dilakukan penyesuaian dengan perubahan target kinerja pada dokumen perencanaan tahunan (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Provinsi Tahun 2024

3.4. Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten/Kota/Provinsi Tahun 2024

no	Indikator kinerja	Kota banjarbaru	Kab. Banjar	Kab. Tala	Kota Bjm	Prov. Kalsel
1.	Indeks kualitas air memenuhi baku mutu	56.36	64,15	50	48	56,42
	Indeks kualitas udara memenuhi baku mutu	96.46	94,62	98,72	91.03	96,41
2.	Persentase pengurangan sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis rumah tangga	27.94	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
	Persentase penanganan sampah (Rumus negative)	72.02	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber data : diolah subbag perencanaan DLH

3.5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan.

a. Indeks kualitas air memenuhi baku mutu

Pencapaian target pada tahun 2024 ini telah memenuhi target baik secara tahunan, lima tahunan dan target nasional, Nilai IKA Kota Banjarbaru saat ini sebesar 56.36, meningkat dibandingkan dengan IKA Kota Banjarbaru Tahun 2023 (50,40) dan target nasional 55,50 dimana . Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam peningkatan kualitas air adalah:

- Meningkatnya pengawasan terhadap pembuangan air limbah kegiatan usaha/industri baik USK atau limbah domestik;
- Pemberian ijin pembuangan air limbah ke badan air sudah mempertimbangkan alokasi beban pencemar;
- Penanganan pengendalian pencemaran air sudah dilakukan secara komprehensif antara pusat dan daerah;
- Banyak pelibatan masyarakat terhadap usaha peningkatan kualitas air;
- Banyak melibatkan usaha dan/atau kegiatan dan lembaga K/L lain untuk kegiatan pengendalian pencemaran air;
- Komitmen daerah terhadap kegiatan pengendalian pencemaran air dalam rangka meningkatkan kualitas air;

- g. Komitmen daerah terhadap pemantauan kualitas air dan sampah di badan air sudah cukup memadai.
- h. Ketersediaan sumber daya manusia di Dinas Lingkungan Hidup yang dinilai cukup untuk dapat melaksanakan program beserta target capaiannya;
- i. Meningkatnya peran swasta dan Organisasi Masyarakat serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup di Kota Banjarbaru.

Adapun Hambatan dalam pencapaian indikator kinerja ini bisa dilihat dari persoalan dari Hulu Ke hilir Sungai di Banjarbaru :

1. Beralih fungsinya kawasan hutan menjadi perumahan dan adanya proyek pemanfaatan material pematangan Lahan.

Upaya yang telah dilakukan :

- agar lebih menerapkan Perda IMB bagi pengembang menyediakan RTH seluas 30% di perumahan dan membuat sumur resapan dengan memperketat izin SPPL
 - Melaksanakan penanaman dan penghijauan di hulu sungai
 - Konservasi pada bagian hulu sungai (sumber air) dengan menjadikan RTH dan membebaskan daerah hulu
 - Memperhatikan dampak Lingkungan dalam pelaksanaan proyek
 - Menanam pohon satu rumah satu pohon
2. Adanya Kotoran ternak (sapi. ayam.kambing) yang dibuang ke sungai

Upaya yang telah dilakukan :

- Pembuatan Biogas dan pupuk kandang
3. Masih adanya sampah organik dan an organik yang dibuang ke sungai

Upaya yang telah dilakukan :

- Pembentukan Bank sampah dan Pembangunan TPS 3R
4. Industri kecil (pabrik tahu) dan Rumah Makan yang tidak memiliki IPAL

Upaya yang telah dilakukan:

- Meningkatkan Pengawasan terhadap Industri kecil dan rumah makan terhadap pembuangan limbah cairnya
- Penegakan hukum pabrik dan rumah makan tidak ada IPAL

b. Indeks kualitas Udara memenuhi baku mutu

Untuk meningkatkan kualitas udara dan mengurangi dampak pencemaran udara dari sumber bergerak maka respon yang perlu dilakukan adalah:

- 1) Memperkuat pelaksanaan persyaratan layak jalan bagi kendaraan bermotor dengan uji kelayakan bermotor dan uji emisi kendaraan.

- 2) Memperbaiki sistem transportasi yang ada saat ini, dengan sistem transportasi massal yang lebih ramah lingkungan dan terjangkau oleh masyarakat.
- 3) Melakukan kampanye hemat bahan bakar mesin dan pemberlakuan pemakaian bensin tanpa timbal.
- 4) Penanaman pohon di sepanjang jalan, setiap rumah, kantor, gudang, dan industri sebagai penyaring udara dan pelindung kebisingan serta memperbanyak taman dan hutan kota.
- 5) Mengurangi adanya penebangan pohon di area hutan, RTH, daerah lahan kritis/lereng/bukit, sempadan sungai, dan badan milik jalan.
- 6) Mengajukan penggunaan masker bagi pengendara sepeda motor.

Hambatan yang masih ditemui adalah : data untuk perhitungan emisi gas rumah kaca masih ada yang kurang seperti data aksi pengurangan emisi gas rumah kaca.

Adanya perubahan sumber pencemar dan kondisi lingkungan menyebabkan perubahan kualitas udara setiap saat. Oleh karena itu perlu adanya pemantauan kualitas udara secara berkala dengan memperhatikan lokasi sampling dan faktor – faktor yang mempengaruhi kualitas udara ambien.

Kualitas udara ambien sangat dipengaruhi oleh kegiatan transportasi dan industri. Sumber pencemaran udara perkotaan berasal dari sumber bergerak yang sangat dipengaruhi oleh kandungan bahan bakar dan pembakaran mesin. Polutan yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor maupun aktivitas industri berupa senyawa CO, HC, O₃, SO₂, NO₂ dan partikulat (TSP, PM₁₀, PM_{2,5}). Peningkatan jumlah kendaraan bermotor dapat menyebabkan meningkatnya pencemaran udara ambien yang bersumber dari kendaraan bermotor.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penyebaran polutan/zat pencemar udara adalah: arah angin, kecepatan angin, tekanan udara, suhu udara, curah hujan dan topografi. Pemantauan kualitas udara ambien dapat dilakukan secara aktif dan pasif. Metode pemantauan secara pasif dilakukan secara manual atau otomatis tetapi tidak secara berkesinambungan dan tidak dapat secara langsung dapat diinformasikan kepada masyarakat umum. Sedangkan metode pemantauan secara aktif dapat dilakukan secara manual atau otomatis, berkesinambungan dan hasilnya dapat diumumkan secara langsung kepada masyarakat (*public data display*).

Kegiatan yang bersinergi dengan Indeks kualitas udara memenuhi baku mutu adalah penanaman pohon di jalan raya terutama di jalan yang masih gersang seperti trikora dan pelaksanaan penanaman pohon pada setiap rumah minimal 1 pohon sehingga meningkatkan nilai ITL serta mengurangi polusi. Dan menindak tegas oknum penebangan pohon ilegal.

c. **Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis rumah tangga.**

Pada Kegiatan di TPS-3R mencakup daur ulang sampah anorganik (plastik dan kardus) dan pengolahan sampah organik (sisa makanan menjadi kompos). TPS-3R memiliki teknologi pencacah sampah dan pengayak kompos yang lebih efektif dan efisien. Hasil kompos dari TPS-3R digunakan untuk pupuk tanaman hias atau digunakan di lahan sekitar areal TPS.

Sementara, bank sampah merupakan solusi yang terlihat ideal dan praktis untuk mengurangi sampah rumah tangga sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan pengelola. Layaknya sistem perbankan, warga menabung bukan dengan uang melainkan dengan sampah kering, seperti plastik, kertas, kardus. Mereka akan mendapatkan buku tabungan.

Namun, kedua program tersebut belum bisa mendorong upaya pemilahan sampah yang dilakukan mandiri oleh masyarakat karena tiga hal berikut :

1) Masyarakat skeptis, di Indonesia, khususnya di Kota Banjarbaru masyarakat skeptis dengan kegiatan pemilahan sampah karena mereka melihat sampah yang sudah dipisahkan nantinya akan tercampur juga di dalam truk dan gerobak sampah.

2) Sarana dan prasarana, keterbatasan fasilitas di TPS-3R dan bank sampah juga menjadi masalah. Pemerintah kota Banjarbaru kewalahan memberikan bantuan sarana dan prasarana pendukung untuk bank sampah, seperti gudang, mesin pencacah, armada angkut, maupun pendampingan tentang pengelolaan fasilitas TPS-3R.

3) Pengelolaan secara profesional, bank sampah biasanya dipegang oleh individu secara sukarela, terutama oleh ibu rumah tangga. Seringkali, bank sampah tidak bisa menutup biaya pengeluaran, seperti aset, fasilitas, dan operasional karena tergantung kepada partisipasi aktif nasabah. Ketika pengelola bank sampah merasa waktu dan tenaga yang tercurah tidak sepadan dengan manfaat ekonomi, maka mereka akan memilih untuk berhenti.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan untuk Pencapaian Indikator Kinerja tersebut di atas didukung dengan :

1. Komitmen Walikota Banjarbaru dan DPRD kota Banjarbaru untuk memberikan pelayanan persampahan kepada masyarakat secara optimal.
2. Komitmen Kepala SKPD dan Jajarannya untuk selalu memperbaiki sistem pelayanan persampahan dari tahun ke tahun.
3. Kesadaran dan Partisipasi aktif dari masyarakat untuk mengelola sampahnya sesuai dengan prinsip 3 R.

d. Persentase Penanganan sampah

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan. Pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Untuk sampah permukiman, pembagian tanggung jawab pengelolaan sampah dibedakan menjadi dua, pengelolaan sampah dari sumber hingga ke TPS menjadi tanggung jawab masyarakat, dan pengelolaan sampah dari TPS hingga ke TPA menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Hal tersebut dijelaskan dalam (Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2010)

Pencapaian Indikator Kinerja tersebut di atas didukung dengan :

- a. Komitmen Walikota Banjarbaru untuk memberikan pelayanan persampahan kepada masyarakat secara optimal.
- b. Komitmen Kepala SKPD dan Jajarannya untuk selalu memperbaiki sistem pelayanan persampahan dari tahun ke tahun.
- c. Kesadaran dan Partisipasi aktif dari masyarakat untuk mengelola sampahnya sesuai dengan prinsip 3 R.

Sedangkan Hambatan yang di rasakan antara lain perilaku masyarakat yang kurang sadar terhadap kebersihan lingkungan dan pola untuk memilah sampah yang akan dibuang, kurang nya sarana dan prasarana, tidak dilakukan nya pengolahan. Semua hambatan tersebut saling berinteraksi dan saling berkaitan sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan di Kota Banjarbaru yang sangat cepat meningkat. Namun dengan kerjasama yang baik antar seluruh pihak yang terkait diyakini mampu menyelesaikan semua permasalahan yang ada.

3.6. Analisis Atas Efisiensi penggunaan sumber daya

1. Indikator Indeks kualitas air memenuhi baku mutu

Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian IKA Tahun 2024 dilakukan dengan Refocusing sub kegiatan dan pengurangan anggaran, Memprioritaskan kegiatan yang memberikan dampak langsung terhadap upaya perbaikan lingkungan, Meningkatkan Kemitraan dengan Gerakan Kemitraan Lingkungan. Selain itu mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan media sosial sebagai sarana komunikasi, sosialisasi, edukasi, dan kampanye ke masyarakat.

2. Indikator Indeks kualitas udara memenuhi baku mutu

Refokusing anggaran dilakukan pada tahun 2024 untuk kegiatan pengelolaan taman keanekaragaman Hayati, pada tahun 2023 jumlah anggaran untuk kegiatan ini

sebesar Rp. 6.124.454.900, anggaran tersebut untuk pembelian alat berat berupa skylift dan pada tahun 2024 anggaran dapat dikurangi sebanyak 250%

3. Indikator persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga

Dalam upaya untuk lebih meningkatkan kegiatan pengurangan sampah dikota Banjarbaru, anggaran pengurangan sampah sub kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Persampahan dan Peningkatan Serta Peran Masyarakat dalam pengelolaan persampahan di **refocusing** ke sub kegiatan Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendaurulang dan pemanfaatan Kembali.

4. Indikator persentase Penanganan sampah

Dalam upaya kegiatan untuk meningkatkan penanganan sampah pada sub kegiatan Pengelolaan persampahan untuk mengakomodir Pokir dewan dalam kegiatan pengadaan kendaraan roda tiga pengangkut sampah dialihkan ke sub kegiatan Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat karena lebih terfokus untuk pembinaan Masyarakat, dimana pengadaan kendaraan roda 3 pengangkut sampai tersebut untuk kegiatan pengelolaan sampah di sumber sampah langsung sehingga program persampahan lebih terfokus untuk penanganan sampah

3.7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- a. Program / Kegiatan yang menunjang dalam pencapaian indikator kinerja indeks kualitas air memenuhi baku mutu adalah sebagai berikut

Pembelian area sumber mata air yang ada di sungai ulin, agar kualitas air dapat terjaga dan jauh dari pencemaran lingkungan sehingga indek kualitas air dapat meningkat, Kegiatan ini terdapat pada program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

- b. Program / Kegiatan yang menunjang dalam pencapaian indikator kinerja indeks kualitas Udara memenuhi baku mutu adalah sebagai berikut

Kegiatan pemenuhan kawasan yang memenuhi baku mutu udara adalah dengan melaksanakan gerakan penghijauan yang konsisten, melibatkan kelompok masyarakat pencinta lingkungan serta melakukan himbauan kepada pemilik kendaraan wajib KIR untuk melaksanakan uji KIR secara rutin.

- c. Program / Kegiatan yang menunjang dalam pencapaian indikator kinerja Meningkatnya Manajemen Pengelolaan persampahan dengan indikator Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis rumah tangga adalah Dengan melakukan

Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendaurulang dan pemanfaatan Kembali dan memberikan Fasilitas untuk Pemenuhan ketentuan terkait izin usaha dan Standar Teknis pengelolaan Sampah serta melakukan Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah

- d. Program / Kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang dalam pencapaian indikator kinerja persampahan dengan indikator persentase penanganan sampah adalah:

Dengan menyediakan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA serta melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan persampahan

B. REALISASI ANGGARAN

1. Indikator Indeks kualitas air memenuhi baku mutu

Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Kinerja Indeks Kualitas Air memenuhi baku mutu Tahun 2024

Program / Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Serapan anggaran (%)
Program pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				
1	Kegiatan pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten/kota	6,335,999,750	5,591,663,518	88.25
2.	Kegiatan Penanggulangan dan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	26,749,550	26,666,550	99.69
3.	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/kota	193,030,700	191,710,700	99.32
	Jumlah	6,555,780,000	5,810,040,768	88.62

2. Indikator Indeks kualitas udara memenuhi baku mutu

Tabel 3.12 Realisasi Anggaran Kinerja Indeks Kualitas udara memenuhi baku mutu Tahun 2024

Program / Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Serapan Anggaran (%)
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				
1.	Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi Gas Rumah kaca, mitigasi dan Adaptasi perubahan Iklim	65,000,000	64,400,000	99.08
Program Pengelolaan Keaneka Ragaman Hayati (KEHATI)				
2.	Pengelolaan Taman Keanekaragaman hayati diluar Kawasan hutan	2,459,261,250	2,408,561,422	97.94
Jumlah program 2		2.524.261.250	2.472.961.422	97,97%

3. Indikator persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga

Tabel 3.13 Realisasi Anggaran Kinerja persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga Tahun 2024

Program / Kegiatan/ sub kegiatan		Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Serapan Anggaran (%)
Program Pengelolaan Persampahan				
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan persampahan	44,869,900	41,013,900	91.41
2	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	1,513,519,700	1,285,840,258	84.96
3	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	4,032,719,250	3,847,818,700	95.41
4	Fasilitasi Pemenuhan ketentuan terkait izin usaha dan Standar Teknis pengelolaan Sampah	304,800,000	279,319,250	91.64
5	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah	40,000,000	24,050,000	60.13
Jumlah		5.935.908.850	5.478.042.108	92,29

4. Indikator persentase Penanganan sampah

Tabel 3.13 Realisasi Anggaran Kinerja persentase Penanganan sampah Tahun 2024

Program / Kegiatan/ sub kegiatan		Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Serapan Anggaran (%)
Program Pengelolaan Persampahan				
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	962,000,000	938,976,000	97.61
2.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	30,433,062,500	26,920,993,205	88.46
	Jumlah	31.395.062.500	27.859.969.205	88,74



Laporan Kinerja tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2024 yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru sudah terlaksana dengan baik dalam artian keseluruhan program-program yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran dapat terealisasi dengan baik sesuai dengan target yang ada pada Penetapan Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dalam pelaporan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup disamping mengungkapkan keberhasilan juga mengungkapkan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja atas sasaran strategis dan indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru Tahun 2024 dapat dijelaskan melalui pencapaian indikator sasaran dengan penjelasan sebagai berikut :

Sasaran Strategis Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 sebagaimana Tabel berikut:

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terjaganya kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks kualitas air memenuhi baku mutu	50,40	56.36	111.82%
		Indeks kualitas udara memenuhi baku mutu	83,48	96.46	115.55%
2.	Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Sampah	Persentase pengurangan sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis rumah tangga	26	27.94	107.46%
		Persentase penanganan sampah (Rumus negative)	74	72.02	102.68%

Untuk mengukur kinerja kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru diuraikan dalam Akuntabilitas Kinerja sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Lingkungan Hidup berada pada kriteria sangat berhasil dengan nilai capaian indikator kinerja kegiatan rata-rata berkisar antara 90 – >100 %.

Berikut ini disajikan capaian kinerja dan realisasi anggaran beserta tingkat efisiensi indikator kinerja utama yang telah dilaksanakan oleh Dinas lingkungan Hidup selama tahun 2024

No	Program, kegiatan dan sub kegiatan	Indikator	capaian kinerja 2024 (%)	Realisasi anggaran 2024 (%)	Tingkat efisiensi
1	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup.	indek kualitas air yang memenuhi baku mutu	111.82%	88,62%	23,2
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	indeks kualitas udara yang memenuhi baku mutu	115,55 %	99.08%	16,47
3	Program Pengelolaan Keaneka ragaman hayati (KEHATI)	Persentase taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan, kebun raya, RTH, dan taman keanekaragaman hayati lainnya dalam kondisi yang terpelihara baik	100%	97.94%	2.06
4	Program Pengelolaan persampahan	Persentase volume sampah yang ditangani oleh pemerintah kota	107.46%	92,29%	15,17
5	Program Pengelolaan persampahan	Persentase penanganan sampah (Rumus negative)	102.68%	88,74 %	13,94

Selama tahun 2024 ada beberapa hal yang perlu perhatian khusus. antara lain :

1. Apabila musim penghujan dengan intensitas tinggi, sering terjadi genangan sampai masuk pemukiman warga maupun wilayah perkantoran daerah lapangan murjani
2. Dalam permasalahan pengelolaan persampahan, terdapatnya TPS liar yang terdapat di permukiman warga

3. Jumlah TPS yang ada di Kota Banjarbaru semakin sedikit, dan status kepemilikan tanah TPS tersebut hanya Sebagian kecil yang di miliki oleh pemerintah Kota Banjarbaru
4. Ada Sebagian kendaraan roda 3 Pengangkut sampah yang dihibahkan kepada masyarakat disalah fungsikan.
5. Masyarakat minta dilakukan pembinaan dalam pengelolaan persampahan

Saran Tindak Lanjut

Dalam rangka menindaklanjuti permasalahan tersebut diatas. maka perlu adanya:

1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.
2. Melakukan peningkatan cakupan pelayanan persampahan di Kota Banjarbaru.
3. Meningkatkan kepemilikan lokasi TPS yang ada di kota Banjarbaru
4. Melakukan reboisasi terhadap lahan yang digunakan untuk pengurugkan yang sering mengakibatkan banjir
5. Jumlah sarana prasarana di tambah agar semua sampah dapat terangkut. karena jumlah penduduk yang semakin banyak dan menghasilkan sampah yang semakin banyak pula.
6. Betul-betul selektif dalam pemberian hibah kepada masyarakat khususnya kendaraan roda tiga pengangkut sampah

Lampiran-lampiran:

**LAMPIRAN PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2024**

NO	PENGHARGAAN	K/L PEMBERI PENGHARGAAN	SKPD
1.	Penghargaan Anugerah Konservasi Alam dalam rangka Hari Konservasi Alam Nasional Tahun 2023 atas peran serta dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan khususnya dalam bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru dengan kategori Pengelola Taman Keanekaragaman Hayati Ex-Situ	Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan yang diserahkan pada tahun 2024	DLH
2.	Penghargaan Green Leadership "Nirwasita Tantra" Tahun 2023 untuk Kepala Daerah	Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan yang diserahkan pada tahun 2024	DLH
3.	Penghargaan dan Piala Adipura tahun 2023 diterima THN 2024	Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan yang diserahkan pada tahun 2024	DLH
4.	Penghargaan Plakat Adipura 2023 Kategori Pasar Terbaik "Pasar Bauntung Kota Banjarbaru"	Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan yang diserahkan pada tahun 2024	DLH

EXCLUDED

 PEMERINTAH KOTA BANJARBARU INSPEKTORAT Jl. Trikora No. 1 Gedung Serba Guna Lt. II Telp/Fax : (0511) 4780069 Banjarbaru website: http://inspektorat.banjarbarukota.go.id / email : inspektorat@banjarbarukota.go.id	Disusun oleh/Tanggal : Tim Reviu/5-02-2025
	Direviu oleh/Tanggal : Ketua Tim/5-02-2025
	Disetujui oleh/Tanggal : Pengendali Teknis/5-02-2025
CATATAN HASIL REVIU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARBARU	
A. URAIAN REVIU 1. Penyajian / Sistematika Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru Tahun 2024 a. Hasil penelahaan terhadap dokumen Laporan Kinerja Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru pada BAB I. LATAR BELAKANG, 1) Telah disajikan penjelasan umum organisasi; 2) Telah disajikan permasalahan utama (isu strategis) yang sedang dihadapi organisasi dan aspek strategis organisasi. b. Hasil penelahaan terhadap dokumen Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru Tahun 2024 pada BAB II. PERENCANAAN KINERJA, 1) Telah menyajikan penjelasan/ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2024 eselon II; 2) Telah menyajikan rencana kegiatan dan anggaran Tahun 2024. c. Hasil penelahaan terhadap dokumen Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru Tahun 2024 pada BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA, • Penyajian capaian kinerja organisasi sebagai berikut : 1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dan setiap pernyataan kinerja sasaran startegis sesuai dengan pengukuran kinerja telah dilengkapi dengan analisis atas capaian kinerja. Telah disajikan perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan pengukuran kinerja dan telah dilengkapi dengan analisis atas capaian kinerja yang disertai dengan data pendukung sesuai dengan formulasi pada Indikator Kinerja Utama.	Indeks KKR KKR A

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terjaganya kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks kualitas air memenuhi baku mutu	50.40	56,36	111,82 %
		Indeks kualitas udara memenuhi baku mutu	83.48	96,46	115,55 %
2.	Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Sampah	Persentase pengurangan sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis rumah tangga	26	27,94	107,46 %
		Persentase penanganan sampah (Rumus negative)	74	72,02	102,68 %

2) Perbandingan realisasi dan capaian kinerja terhadap realisasi dan capaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir

Belum disajikan perbandingan capaian kinerja terhadap capaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir, yaitu Tahun 2023 dan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024		Tahun 2023		Tahun 2022	
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Indeks kualitas air memenuhi baku mutu	56,36	111,82 %	49,09	97,59 %	55,26	92,82 %
	Indeks kualitas udara memenuhi baku mutu	96,46	115,55 %	88,91	106,63 %	87,64	99,69 %
2.	Persentase pengurangan sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis rumah tangga	27,94	107,46 %	26.02	104,08 %	24,05	100,21 %
	Persentase penanganan sampah (Rumus negative)	72,02	102,68 %	73,97	101,37 %	75,88	100,16 %

3) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tim penyusun laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup telah menyajikan analisis perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam

dokumen perencanaan strategis organisasi (target akhir Renstra).

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Renstra
1.	Terjaganya kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks kualitas air memenuhi baku mutu	56,36	50,40
		Indeks kualitas udara memenuhi baku mutu	96,46	83,48
2.	Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Sampah	Persentase pengurangan sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis rumah tangga	27,94	27
		Persentase penanganan sampah (Rumus negative)	72,02	74

Target jangka menengah (Renstra) yang dituangkan oleh DLH pada LKj Tahun 2024 **berbeda** dengan dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (target akhir Renstra).

- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional Tim penyusun laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup telah menyajikan analisis perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional seperti pada tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Nasional
1.	Terjaganya kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks kualitas air memenuhi baku mutu	56,36	55,5
		Indeks kualitas udara memenuhi baku mutu	96,46	84,5
2.	Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Sampah	Persentase pengurangan sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis rumah tangga	27,94	28
		Persentase penanganan sampah (Rumus negative)	72,02	72

- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; Tim penyusun laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup telah menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Tim penyusun laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup telah menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis juga dilakukan pada efisiensi anggaran yang dihitung dari sisa realisasi penyerapan anggaran dan telah menyajikan efisiensi dari perhitungan besaran anggaran aktifitas yang tidak menunjang pencapaian kinerja yang kemudian di <i>refocusing</i>. 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Tim penyusun laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup telah menyajikan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. • Realisasi Anggaran Tim penyusun laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup telah menyajikan akuntabilitas keuangan, yaitu realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. d. Hasil penelaahan terhadap dokumen Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru Tahun 2024 pada BAB IV. PENUTUP 1) Telah menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi; 2) Telah menyajikan langkah perbaikan dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. B. Analisis Mekanisme Penyusunan Laporan Kinerja Berdasarkan hasil penelaahan pada dokumen SK Penetapan Tim SAKIP pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru dan SOP Pengumpulan Data Kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Laporan kinerja (LKj) disusun oleh unit Kepala Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaporan kinerja; 2. Informasi yang disampaikan dalam Laporan kinerja (LKj) telah didukung dengan data yang memadai yaitu berasal dari laporan triwulan setiap bidang; 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari bidang-bidang ke penyusun Laporan kinerja (LKj) yaitu Kepala Sub Bagian Perencanaan;	KKR B
---	--------------

4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap bidang;
5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam Laporan kinerja (LKj) telah diyakini keandalannya;
6. Analisis/penjelasan dalam Laporan kinerja (LKj) telah diketahui oleh bidang-bidang terkait.

KKR C

C. Analisis Substansi Penyajian Laporan Kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru

Berdasarkan hasil penelaahan data-data yang disajikan dalam Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru Tahun 2024, dapat disimpulkan :

1. Sasaran strategis dan indikator kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 telah sesuai.

No.	Laporan Kinerja			Perjanjian Kinerja		
	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks kualitas air memenuhi baku mutu	50,40	Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks kualitas air memenuhi baku mutu	50,40
		Indeks kualitas udara memenuhi baku mutu	83,48		Indeks kualitas udara memenuhi baku mutu	83,48
2	Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Sampah	Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	26	Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Sampah	Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	26
		Persentase penanganan sampah	74		Persentase penanganan sampah	74

2. Sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 telah sesuai.

No.	Laporan Kinerja			Rencana Strategis		
	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks kualitas air memenuhi baku mutu	50,40	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas air dan indeks kualitas udara yang memenuhi baku mutu	IKA 50,40
		Indeks kualitas udara memenuhi baku mutu	83,48			IKU 83,48
2	Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Sampah	Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	26	Meningkatnya pelayanan dan pengelolaan persampahan	Persentase volume sampah yang ditangani oleh Pemerintah Kota	26

		Persentase penanganan sampah	74			74
--	--	------------------------------	----	--	--	----

Target kinerja Renstra yang disajikan pada Laporan Kinerja telah sesuai dengan Target kinerja pada dokumen Rencana Strategis (pada tabel 6.1) namun berbeda dengan tujuan dan target kinerja pada dokumen Renstra (halaman 70).

3. Sasaran strategis dan indikator kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja dengan Indikator Kinerja Utama telah sesuai.

No.	Laporan Kinerja			Indikator Kinerja Utama		
	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks kualitas air memenuhi baku mutu	50,40	Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks kualitas air memenuhi baku mutu	-
		Indeks kualitas udara memenuhi baku mutu	83,48		Indeks kualitas udara memenuhi baku mutu	-
2	Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Sampah	Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	26	Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Sampah	Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	-
		Persentase penanganan sampah	74		Persentase penanganan sampah	-

4. Indikator kinerja yang ditetapkan telah cukup mengukur sasaran strategis dan dianggap cukup SMART.

B. MATERI

Reviu terbatas pada data dan analisa yang disajikan dalam dokumen Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru Tahun 2024 beserta dokumen pendukung lain yang terkait langsung dengan indikator kinerja.

C. SIMPULAN HASIL PENGUJIAN / ANALISIS

Analisis, Pengujian dan verifikasi terbatas pada data dan analisa yang disajikan dalam dokumen Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru beserta dokumen pendukung lain yang terkait langsung dengan indikator kinerja, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Format Penyajian / Sistematika Laporan Kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru Tahun 2024

Berdasarkan hasil reviu secara garis besar sistematika penyajian dan materi Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru Tahun 2024 telah mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

a. Pada BAB III, yaitu :

- 1) Tim penyusun laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup telah menyajikan analisis perbandingan capaian kinerja terhadap capaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir, yaitu Tahun 2022 dan Tahun 2021.
- 2) Tim penyusun laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup telah menyajikan analisis perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (target akhir Renstra);
- 3) Tim penyusun laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup belum menyajikan analisis perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
- 4) Tim penyusun laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup telah menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis juga dilakukan pada efisiensi anggaran yang dihitung dari sisa realisasi penyerapan anggaran namun telah menyajikan efisiensi dari perhitungan besaran anggaran aktifitas yang tidak menunjang pencapaian kinerja yang kemudian di *refocusing*;
- 5) Tim penyusun laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup telah menyajikan akuntabilitas keuangan dengan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

b. Pada Bab IV, yaitu :

Telah menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

2. Substansi Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru Tahun 2023

Substansi Laporan Kinerja telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, namun masih terdapat ketidaksesuaian pada target kinerja pada Laporan Kinerja dengan target kinerja pada dokumen rencana strategis (Renstra periode 2021 - 2026).

3. Mekanisme Penyusunan Laporan Kinerja

Mekanisme Penyusunan Laporan Kinerja (Laporan kinerja (LKj) telah sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

D. REKOMENDASI UNTUK DITINDAKLANJUTI

Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru agar memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan untuk melakukan perbaikan penyajian Laporan Kinerja pada target kinerja Renstra yang disajikan pada Laporan Kinerja.

Pengendali Teknis,



Tia Melyana R.S, SKM

Pembina (IV/a)

NIP. 19820228 200604 2 012



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jl. Trikora Soekarno Hatta No. 8 Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan
Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan Telp/Fax. (0511) 4770178
Laman : <http://dlh.banjarbarukota.go.id/> E-mail : dlh.banjarbarukota.go.id

Banjarbaru, 20 Februari 2025

Nomor : 000.8.63/ 0113 / Set-perenc/DLH
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Tanggapan Catatan Hasil Reviu
(CHR) Laporan Kinerja 2024

Kepada Yth.

Tim Reviu Laporan Kinerja 2024 Inspektorat

Di

Banjarbaru

Berdasarkan Catatan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru tanggal 5 Februari 2025 yang kami terima pada tanggal 20 Februari 2025 dengan ini kami sampaikan ucapan terima kasih atas hasil reviu yang menyatakan bahwa laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru telah mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

Namun demikian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru telah memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan untuk melakukan perbaikan penyajian Laporan Kinerja pada target kinerja Renstra yang disajikan pada Laporan Kinerja (surat terlampir)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,



SIRAJONI, AP, MM
Pembina Utama Muda/ IVc
NIP. 19750610 199501 1 001



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Jl. Trikora Soekarno Hatta No. 8 Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan
Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan Telp/Fax. (0511) 4770178
Laman : <http://dlh.banjarbarukota.go.id/> E-mail : dlh.banjarbarukota.go.id

NOTA DINAS

Yth : Kasubag Perencanaan
Dari : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Tembusan : -
Tanggal : 20 Februari 2025
Nomor : 700.1 / 01g /Set-Perenc/DLH
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : CHR Laporan Kinerja 2024 dari Inspektorat

Berdasarkan Catatan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru tanggal 5 Februari 2025 yang kami terima pada tanggal 20 Februari 2025 dengan ini diminta kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan untuk melakukan perbaikan penyajian Laporan Kinerja pada target kinerja Renstra yang disajikan pada Laporan Kinerja.

Kepala Dinas,



SIRAJONI, AP, MM
Pembina Utama Muda/ IVc
NIP. 19750610 199501 1 001